KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR RI Muhibah ke AS: Masukan untuk Paket 6 RUU Penguatan Lembaga Perwakilan
Tanggal : Senin, 13 Mei 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 7

DPR RI Muhibah ke AS

Masukan untuk Paket 6 RUU Penguatan Lembaga Perwakilan



Tim Implementasi Reformasi Parlemen menuntaskan muhibah ke Amerika Serikat (AS), sejak Senin 29 April sampai hingga Minggu, 1 Mei 2019. Selama muhibah, delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Anggota DPR seperti Arsul Sani (F-PPP), Sodiq Mujahid (F-Gerindra), Ibnu Munzir (F-PG) dan M. Lutfhi (F-Nasdem), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Keahlian DPR, Tim Perumus UU dan Tenaga Ahli menemui Congressional Research Service, Sekretariat Jenderal House of Representatives, Anggota Parlemen dari Partai Republican Rodney Davis.

Selain itu, untuk mendapatkan masukan penguatan sistem pendukung DPR, delegasi bertemu dengan USA-Indonesia Society (USINDO), Congressional Institute di Alexandria dan lembaga Think Tank tertua yakni Brooking di Washington DC.

Fahri Hamzah mengatakan kegiatan muhibah ini untuk mendapatkan masukan atas 1 paket dari 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penguatan Lembaga Perwakilan yakni MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Lembaga Etik dan Tata Kelola Keuangan DPR. Keenam RUU Lembaga Perwakilan yang berdiri sendiri yaitu 1. RUU tentang MPR; 2. RUU tentang DPR; 3. RUU tentang DPD; 4. RUU DPRD; 5. RUU tentang Etika Lembaga Perwakikan; dan 6. RUU tentang Lembaga Parlemen. Keenam RUU tersebut mengatur secara terpisah, agar masing-masing lembaga ditempatkan kedudukan yang kuat sesuai dengan amanat konstitusi.

"Dengan paket UU ini diharapkan DPR akan punya posisi yang makin kuat dan mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya dalam sistem politik di Indonesia," ungkap Fahri.

Masih menurut Fahri, Mekanisme checks and balances antara lembaga negara kurang berjalan dengan maksimal, karena dalam kenyataannya, kekuasaan eksekutif masih dominan, ketergantungan DPR kepada eksekutif dari segi anggaran dan sumber daya manusia pendukung masih sangat tinggi.

Sistem dan tata kelola lembaga perwakilan, disebutkan oleh Fahri masih menggunakan pola dan cara kerja lembaga eksekutif yang membuat lembaga perwakilan tidak maksimal dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka dari itu, blue print Implementasi Reformasi Parlemen merupakan road map penguatan lembaga perwakilan yang mencakup tiga bidang, yaitu penguatan bidang kelembagaan, penguatan sistem pendukung, dan penguatan kemandirian lembaga perwakilan.

Penyempurnaan blue print Implementasi Reformasi Parlemen akan dilanjutkan dengan masukan dari Fraksi-Fraksi DPR yang kemudian dilanjutkan dengan pengusulannya kepada Badan Legislasi untuk dimasukan dalam daftar program legislasi nasional dan diagendakan proses pembentukannya menjadi Undang-Undang yang diharapkan bisa diselesaikan sebelum DPR 2014-2019 menyelesaikan masa baktinya pada tanggal 30 September 2019 yang akan datang.

"Tetapi saya akan memperbaiki RUU tentang Reformasi Parlemen ini, dan kita akan mencoba dalam 5 bulan ini. Karena pada tanggal 1 Oktober dimana akan menjadi integrasi anggota Dewan yang baru terpilih," ucap Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan US Congressional Institute di Virginia, Senin (29/4) guna menggali masukan penyiapan paket RUU penguatan kapasitas DPR.

DPR menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan.

[info]